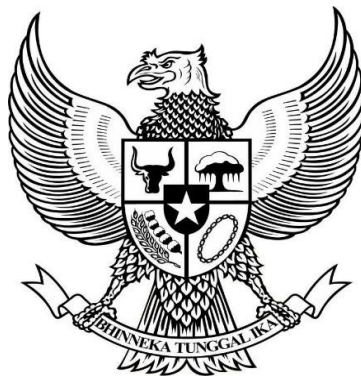


LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026



RENCANA KERJA
KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025- 2029, Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Jumantono , September 2025

CAMAT JUMANTONO



GUNAWAN, S.E., M.M

Pembina Tk I

NIP. 19671223 199401 1 002

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Landasan Hukum.....	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I.3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I.3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....	II.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun Lalu dan Capaian Renstra...	II.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono.....	II.6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Jumantono.....	II.16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II.19
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II.23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	III.1
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	III.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	III.3
3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.....	III.7
3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD.....	III.7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JUMANTONO.....	IV.1
4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jumantono	IV.1
4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono.....	IV.2
4.3 Data Indidkatif Kecamatan Jumantono.....	IV.3
4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jumantono.....	IV.3
BAB V PENUTUP.....	V.1
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	V.1
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	V.1
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	V.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan I.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 202.....	II.2
Tabel 2.2.	Realisasi APBD di Kecamatan Jumantono Tahun 2024 dan 2025 (TW II).....	II.4
Tabel 2.3.	Capaian Kinerja Program Unsur Kewilayahan Tahun 2024.....	II.6
Tabel 2.4.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar.....	II.7
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja IKU Kecamatan Jumantono Tahun 2024 – 2025 (semester I) Kabupaten Karanganyar.....	II.15
Tabel 2.6.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jumantono.....	II.18
Tabel 2.7.	Rumusan Isu Strategis Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.....	II.19
Tabel 2.8.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Jumantono.....	II.21
Tabel 2.9.	Usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Jumantono..	II.24
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Indikator Sasaran dan Program (Target Tahun 2026).....	III.6
Tabel 3.2.	Keselarasn Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD.....	III.8
Tabel 3.3.	Keselarasn Sasaran OPD dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	III.8
Tabel 4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jumantono Tahun 2026.....	IV.4
Tabel 4.2.	Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumantono Tahun 2026.....	IV.12
Tabel 4.3.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026...	IV.12

BAB I PENDAHULUAN

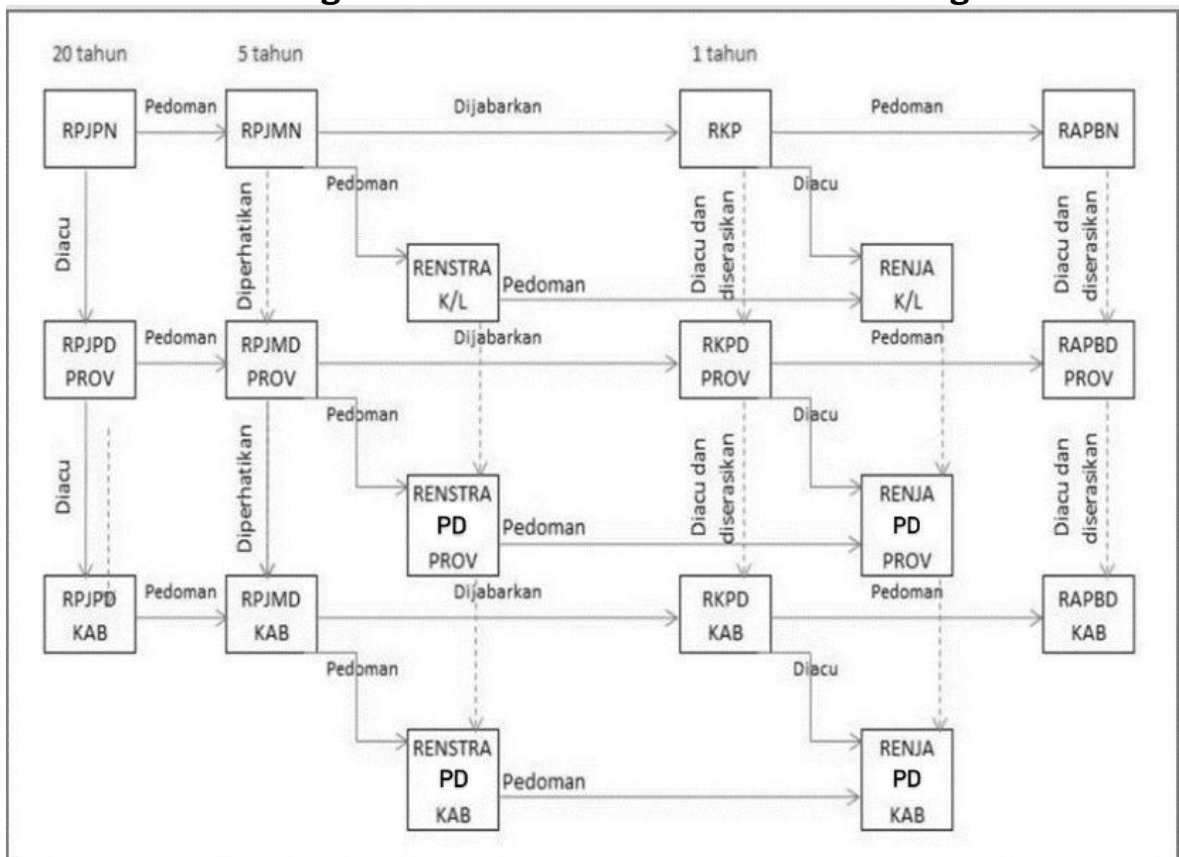
1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jumantono untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA-PD) Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peratutan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaeanganyar Nomo 1 Tahun 2013 tentangRencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jumantono disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Jumantono, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD.
- 1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Jumantono.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Jumantono, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMANTONO TAHUN 2024

- Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Jumantono tahun lalu (2024).
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jumantono
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumantono
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JUMANTONO

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jumantono

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Jumantono berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi APBD Kecamatan Jumantono.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2024-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

A. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja

Kecamatan Jumantono untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.522.647.505,- (*dua milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.557.025.025,- (*satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu dua puluh lima rupiah*), dan belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 965.622.480,- (*Sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.495.431.943,- (*Dua Milyar Empat Ratus sembilan puluh lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) atau sebesar 98,92 %, sisa anggaran Rp. 27.215.562,- (*Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus lima Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) atau sebesar 1,08%.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 kegiatan dengan capaian kinerja 90,78%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.410.931.258,- dan terealisasi Rp. 2.188.660.103,- (90,78%)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 6.013.500,- dan terealisasi Rp. 6.013.500,- (100%).

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 133.384.900,- terealisasi sebesar Rp. 133.375.400,- (100%).
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 99%. Anggaran yang tersedia Rp. 75.969.750,- terealisasi sebesar Rp. 72.169.750,- (95%).
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 3 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 51.937.650,- terealisasi sebesar Rp. 51.836.800,- (100%).
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 14.361.400,- terealisasi sebesar Rp. 14.361.400,- (100%).
Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024-2026 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD
Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.071.583.368	2.094.415.543	99	2.600.000.000	2.600.000.000	100,00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.648.700	7.648.700	0	13.421.000	13.421.000	100,00
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	3.725.900	3.725.900	0	4.629.000	4.629.000	100,00
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.922.800	3.922.800	100	8.792.000	8.792.000	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.435.008.088	1.435.008.088	99	1.862.415.400	1.862.415.400	100,00
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.435.008.088	1.435.008.088	99	1.862.415.400	1.862.415.400	100,00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.853.780	242.253.780	99	238.977.000	238.977.000	100,00
4)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7.173.930	7.173.930	100	10.580.000,00	10.580.000,00	100,00
5)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.737.500	18.000.000	121	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
6)	Penyediaan bahan logistik kantor	6.000.000	6.450.000	108	7.935.000,00	7.935.000,00	100,00
7)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.600.000	7.600.000	100	11.030.000,00	11.030.000,00	100,00
8)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100	3.651.000,00	3.651.000,00	100,00
9)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	190.372.350	196.059.850	103	188.531.000,00	188.531.000,00	100,00
10)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.700.000	970.000	10	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.162.500	58.012.500	100	63.706.600,00	63.706.600,00	100,00
11)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.162.500	58.012.500	100	63.706.600	63.706.600	100,00
12)	Pengadaan mebel	0	0	0	0	0	100,00
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.964.500	279.964.500	100	357.842.000,00	357.842.000,00	100,00
13)	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000	600.000	100	1.270.000,00	1.270.000,00	100,00
14)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	37.800.000	37.800.000	100	41.262.000,00	41.262.000,00	100,00
15)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	241.564.500	241.564.500	100	315.310.000,00	315.310.000,00	100,00
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.945.800	50.945.800	100	63.638.000,00	63.638.000,00	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
16)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.421.000	27.421.000	100	33.043.000,00	33.043.000,00	100,00
17)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.460.000	18.460.000	100	23.991.000,00	23.991.000,00	100,00
18)	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.064.800	5.064.800				100,00
19)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	100	6.604.000,00	6.604.000,00	100,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.013.500	6.013.500	100	6.640.200	6.640.200	100,00
7.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.013.500	6.013.500	100	6.640.200	6.640.200	100,00
20)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.013.500	6.013.500	100	6.640.200	6.640.200	100,00
III. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.361.400	14.361.400	100	31.500.000	31.500.000	100,00
8.	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	14.361.400	14.361.400	100	15.750.000	15.750.000	100,00
21)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.970.700	9.970.700	100	10.500.000	10.500.000	100,00
22)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	4.390.700	4.390.700	100	5.250.000	5.250.000	100,00
9.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	0	0	100	15.750.000	15.750.000	100,00
23)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	0	100	15.750.000	15.750.000	100,00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	132.634.900	133.384.900	101	168.587.000	168.587.000	100,00
10.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	132.634.900	133.384.900	101	168.587.000	168.587.000	100,00
24)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	132.634.900	133.384.900	101	168.587.000	168.587.000	100,00
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.969.750	75.969.750	100	80.896.200	80.896.200	100,00
11.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.969.750	75.969.750	100	80.896.200	80.896.200	100,00
25)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	49.000.000	49.000.000	100	57.960.000	57.960.000	100,00
26)	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	26.969.750	26.969.750	100	22.936.200	22.936.200	100,00
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.067.650	47.067.650	94	66.276.000	66.276.000	100,00
12.	Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.067.650	47.067.650	94	66.276.000	66.276.000	100,00
27)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.815.750	15.375.750	91	21.126.000	21.126.000	100,00
28)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.470.850	17.910.850	92	23.474.850	23.474.850	100,00
29)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	7.185.150	7.185.150	100,00
30)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	13.781.050	13.781.050	100	14.490.000	14.490.000	100,00

Tabel 2.2
Realisasi APBD di Kecamatan Jumantono
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 (TW II)		
		APBD	REALISASI	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.094.415.543	2.094.415.543	99	2.303.404.257	1.111.730.242	48
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.648.700	7.648.700	100	8.872.680	3.528.528	39
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	3.725.900	3.725.900	100	4.867.100	2.419.700	50
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.922.800	3.922.800	100	4.005.580	1.108.828	28
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.435.008.088	1.435.008.088	99	1.722.644.027	892.163.836	52
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.435.008.088	1.435.008.088	99	1.722.644.027	892.163.836	52
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.253.780	242.253.780	99	184.175.550	82.776.825	43,8
4)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7.173.930	7.173.930	100	5.054.050	3.425.475	68
5)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	18.000.000	100	0	0	0
6)	Penyediaan bahan logistik kantor	6.450.000	6.450.000	100	6.300.000	2.085.000	33
7)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.950.000	5.950.000	100	6.800.000	2.069.000	30
8)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100	6.000.000	2.500.000	42
9)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	193.889.850	192.437.850	99	158.197.500	72.697.350	46
10)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.020.000	2.020.000	100	1.824.000	0	0
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.862.500	88.965.470	99	42.825.000	-	0
11)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.862.500	77.265.470	100	42.825.000	-	0
12)	Pengadaan mebel	12.000.000	11.700.000	98	0	0	0
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.964.500	282.964.500	98	283.418.600	117.901.553	41,59
13)	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000	600.000	100	600.000	0	0
14)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	40.800.000	38.495.032	94	40.800.000	16.637.653	41
15)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	241.564.500	241.564.500	100	242.018.600	101.263.900	42
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.945.800	50.945.800	100	61.468.400	15.359.500	27,5
16)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.471.000	36.569.500	98	37.630.000	11.259.500	30
17)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.460.000	18.460.000	100	16.680.000	4.100.000	25
18)	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0			0
19)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.064.800	5.064.800	100	7.158.400	0	0
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.013.500	6.013.500	100	6.245.750	0	0
7.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.013.500	6.013.500	100	6.245.750	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 (TW II)		
		APBD	REALISASI	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
20)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.013.500	6.013.500	100	6.245.750	0	0
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.361.400	14.361.400	100	14.438.400	10.150.700	70,30
8.	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	14.361.400	14.361.400	100	14.438.400	10.150.700	70,30
21)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.970.700	9.970.700	100	10.150.700	10.150.700	100
22)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	4.390.700	4.390.700	100	4.287.700	0	0
9.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	0	0	100	0	0	0
23)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	0	100	0	0	0
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	133.384.900	133.375.400	100	126.263.000	51.250.000	41
10.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	133.384.900	133.375.400	100	126.263.000	51.250.000	41
24)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	133.384.900	133.375.400	100	126.263.000	51.250.000	41
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.969.750	72.219.750	92	48.000.000	0	0
11.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.969.750	72.219.750	92	48.000.000	0	0
25)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	49.000.000	45.250.000	84	48.000.000	0	0
26)	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	26.969.750	26.969.750	100	24.010.950	0	0
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.937.650	51.836.800	100	43.124.150	4.750.000	14
12.	Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.937.650	51.836.800	100	43.124.150	4.750.000	14
27)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.375.750	15.363.750	100	13.782.700	0	0
28)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.910.850	17.822.000	100	15.985.050	0	0
29)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	0	0	0
30)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	18.651.050	18.651.050	100	11.136.400	4.750.000	43

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.889.367.358	2.666.211.203	98	2.094.415.543	2.094.415.543	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.867.400	2.867.400	100	6.013.500	6.013.500	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.008.000	16.008.000	100	14.361.400	14.361.400	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	275.576.100	275.376.100	100	133.384.900	133.375.400	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	86.713.100	86.570.600	100	75.969.750	72.219.750	92
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.462.400	17.462.400	100	51.937.650	51.836.800	100
	Persentase realisasi	3.287.994.358	3.064.495.703	99,6	2.376.082.743	2.372.222.393	98,6
	Rata-rata realisasi 6 program			99,6			98,6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono

Kecamatan Jumantono merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jumantono dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan OPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jumantono meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal,

serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan:

- Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
- Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
- Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
- Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
- Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
- Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
- Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
- Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

Kelemahan:

- Masih cukup banyak penduduk miskin
- Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
- Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
- Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
- Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
- Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
- Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
- Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
- Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- Munculnya paham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jumantono berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

TABEL 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Jumantono s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kineja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4x100)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
KECAMATAN JUMANTONO										
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Sakip	70	67,15	75,3	68,65	92,16	68,70		
		Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK yang tercapai targetnya			100	100	100	100		
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100%		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50
7.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	28

07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Kinerja Administasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	87	100%	87	100	100%		
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji	15 Orang	12 Orang /bulan	13 Orang /bulan	13 Orang /bulan	100	13 Orang /bulan	13 Orang / bulan	78
07.01.01.2.02.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	12 Bulan	100 %	100 %	100	100 %	100 %	
07.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	63
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.2.02.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	56
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	46
07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	67
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum, Perjalanan Dinas yang di sediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	75
07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Jumantono)	Jumlah Arsip Dinamis yang dibeli	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokume n	6 Dokumen	3 Dokumen	40

07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100	100%	100	100	100 %	0	0
07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor yang disediakan	8 buah	8 buah	2 unit	2 unit	100	0	0	0
07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	3 unit	3 unit	5 unit	5 unit	100	0	0	0
07.01.01.2.07.09	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket	0	0	0	0	0	0
07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100	100%	100	100	100 %	0	0
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang terlaksana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	0
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12 Laporan	12 Laporan	12Laporan	12 Laporan	100	12Laporan	12Laporan	74
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	73
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	
	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100%	100	100	100 %		
07.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan yang dilaksanakan	4 unit	4 unit	4 Unit	4 unit	100	4 Unit	4 Unit	59
07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	100	100	100%	100	100	100 %	37	37
07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	2 Unit	2 unit	100	1 Unit	1 unit	37

07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	75	87,40	79	88,95	127	89,00	0	0
07.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	87,40	79	88,95	127	89,00	0	0
07.01.02.2.02.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan"	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	0	0
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%	100 %	100
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%	100 %	100
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	100	11 Lembaga	11 Lembaga	100
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	0	0
	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0	0	0	0	0	0	0	0
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE WILAYAH DALAM KEADAAN KONDUSIF	100 %	100	100%	100	100%	100%	71	
07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	71	
07.01.04.2.01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenatara Nasional Indonesia dan Instansi	"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	71

	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan"								
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksana	100 %	100	100	100	100%	100%	0	
07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		100	99,5%	100	100%	100%	0	
07.01.05.2.01.03	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatua Bangsa	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 orang	100	75 Orang	75 orang	100
07.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan nasional	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang		0
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	100	100%	100	100%	100%	43%	
07.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa		100	100%	100	99%	100%	43%	
07.01.06.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	0	0

07.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	0	0
07.01.06.2.01	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.06.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	11 Dokumen	98

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Jumantono

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian		Catatan Analisis
						Th 2024	Th 2025 Smt. 1	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	112	Na	
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	88.95	Na	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota daerah	Nilai SAKIP	Nilai	68.65	Na	
				Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Nilai	100	67,57	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	Na	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	71	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	71	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	99.80	89	

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar

Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
		Th 2024	Th 2025	Th 2024	Th 2025	
Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	75	75	100	Na	
Nilai IKM	Nilai	79	79	88.95	Na	
Nilai SAKIP	Nilai	75.30	68.70	68.65	Na	
Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	100	Na	
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	71	
Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100	71	
Persentase Desa / Kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	100	100	
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	99.80	89	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumantono

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Sedangkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2029.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

- 1. Kapasitas SDM aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat belum optimal.**
Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun keterampilan. Aparat kecamatan seringkali belum sepenuhnya menguasai tugas-tugas pelayanan publik, administrasi, maupun teknis lainnya. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Sistem kerja kecamatan belum terumuskan dengan jelas.**
Kecamatan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja yang terdokumentasi secara sistematis, sehingga pelaksanaan tugas sering bersifat tidak konsisten. Akibatnya, koordinasi internal maupun eksternal menjadi kurang efektif.
- 3. Pengelolaan administrasi belum optimal.**
Administrasi pemerintahan, pelaporan kegiatan, pengarsipan, dan manajemen data masih belum berjalan secara tertib dan efisien. Banyak kegiatan administrasi masih dilakukan secara manual, dan belum terintegrasi dengan sistem informasi yang memadai.
- 4. Wilayah yang harus dilayani cukup luas, dihadapkan dengan persoalan sarana kerja yang belum memadai.**
Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan medan geografis yang bervariasi membutuhkan mobilitas dan jangkauan layanan yang tinggi. Namun, fasilitas kerja seperti kendaraan dinas, perangkat teknologi, dan sarana komunikasi masih terbatas dan kurang memadai untuk mendukung pelayanan yang optimal.
- 5. Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan akibat ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi pembangunan.**

Masyarakat enggan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan karena merasa aspirasinya tidak didengar atau tidak diwujudkan dalam program nyata. Ketidakpercayaan ini menciptakan jarak antara pemerintah dan warga dalam proses pembangunan.

6. Kurang pedulinya masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun.

Setelah pembangunan fisik seperti jalan, saluran air, atau fasilitas umum selesai dibangun, masyarakat kurang terlibat dalam upaya pemeliharaan. Akibatnya, sarana cepat rusak dan tidak berfungsi optimal.

7. Potensi lokal belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.

Banyak potensi yang dimiliki oleh wilayah kecamatan, seperti hasil pertanian, kerajinan, pariwisata, atau sumber daya alam, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut sering belum diolah dengan baik atau belum mendapat dukungan yang cukup agar bisa berkembang.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumantono, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jumantono yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jumantono

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah aparatur belum sebanding dengan kebutuhan • Kompetensi SDM belum merata • Sarana dan Prasarana pelayanan masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan • SOP pelayanan belum dijalankan secara konsisten • Beban kerja antar pegawai belum seimbang
Belum optimalnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa	Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Standar pelayanan kepada masyarakat desa belum optimal • Dukungan sarana dan prasarana pelayanan sebagian di luar kewenangan kecamatan • Wilayah kecamatan cukup luas dibanding SDM yang tersedia • Titik rawan sosial dan keamanan di desa belum tertangani • Pemahaman penegakan PERDA belum merata
Belum optimalnya dukungan pembangunan desa dan pelayanan sosial	Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Data penerima bantuan sosial tidak terpadu antar sumber • Sebagian pengaduan masyarakat desa belum ditindaklanjuti • Dukungan kelembagaan desa terhadap program prioritas belum optimal • Laporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan • Kapasitas administrasi perangkat desa masih bervariasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Kecamatan Jumantono dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu segera diidentifikasi dan dikelola. Isu-isu strategis ini mencerminkan kondisi aktual yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara keseluruhan. Dengan memahami isu-isu tersebut secara komprehensif, Kecamatan Jumantono dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan desa.

Analisis terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam merancang program kerja dan inovasi ke depan, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang transparan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka, disimpulkan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan adalah **Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat kecamatan dan desa**. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang belum memadai serta belum merata di setiap unit kerja.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang dalam mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Penerapan standar pelayanan publik dan SOP yang belum berjalan konsisten.
4. Dukungan kelembagaan desa dalam pemberdayaan masyarakat belum optimal.
5. Sinkronisasi pembangunan desa dengan target pembangunan daerah belum optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Jumantono dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jumantono dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Jumantono Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029. Rencana Kerja Kecamatan Jumantono berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jumantono.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	KECAMATAN				2.691.472.340					3.566.832.869	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Kec. Jumantono	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	2.560.392.540	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. Jumantono	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	3.139.500.000	
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Jumantono	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	8.872.680	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Jumantono	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	17.750.250	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jumantono	Cakupan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.858.484.000	administrasi keuangan	Kec. Jumantono	Cakupan administrasi keuangan	100 %	2.137.256.600	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kec. Jumantono	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	191.243.860	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Jumantono	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	316.049.900	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Jumantono	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Jumantono	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	111.032.500	

	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Jumantono	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	384.607.000	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Jumantono	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	473.248.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Jumantono	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	67.185.000	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Jumantono	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	84.162.750	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jumantono	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	6.362.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jumantono	Indek Kepuasan Masyarakat	89,10	8.017.800	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Jumantono	Cakupan Jumlah Kegiatan pelayanan yang sesuai standar		6.362.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Jumantono	Cakupan Jumlah Kegiatan pelayanan yang sesuai standar		8.017.800	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jumantono	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	100 %	18.846.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jumantono	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	100 %	38.036.250	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jumantono	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	18.846.400	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jumantono	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	38.036.250	

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Jumantono	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	27.600.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Jumantono	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	203.568.400	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jumantono	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	27.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jumantono	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	203.568.400	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Jumantono	Persentase Desa /Kelurahan Tertib Perda	100 %	59.207.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Jumantono	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100 %	97.682.161	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jumantono	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	59.207.000	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jumantono	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	97.682.161	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Jumantono	Persentase Desa memiliki APBDes dan RPKDes sesuai Ketentuan	100 %	19.064.100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Jumantono	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RPKDes yang sesuai ketentuan	100%	80.028.258	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jumantono	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	19.064.100	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Jumantono	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	100%	80.028.258	

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Jumantono. Namun dalam proses ini Kecamatan Jumantono mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Jumantono terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Jumantono.

Tabel 2.9

Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jumantono

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah **“Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;

7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;

5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indeks Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskal Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, meskipun sampai saat Renja di susun masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
- 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

- 1) Meningkatkan potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
- 3) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender;
- 4) Meningkatkan ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
- 5) Meningkatkan riset dan inovasi;
- 6) Meningkatkan kondusivitas wilayah;
- 7) Meningkatkan pelestarian kebudayaan daerah;
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
- 9) Meningkatkan kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
- 10) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah;
- 11) Meningkatkan akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
- 12) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah **Internalisasi Nilai Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Sosial, dan Pelestarian Budaya**. Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Mewujudkan kondusivitas sosial dengan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kewaspadaan dini, dan partisipasi pembangunan. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal dengan menjaga seni, budaya, cagar budaya, serta meningkatkan keterlibatan generasi muda.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta "Karanganyar Bebas Jeglongan";
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;

13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan modernisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade. *(Ranwal RPJMD hal III-41)*.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Rasio Gini: 0,342;
3. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,57;
6. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
7. Nilai SAKIP: 71,00;
8. Maturitas SPIP: 3,85;
9. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
10. Kontribusi Penurunan Emisi GRK: 5.589.731,15;
11. Kasus Konflik SARA: 0;
12. Angka Kriminalitas: 178;
13. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
14. Kapabilitas inovasi: 3;
15. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jumantono

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Jumantono adalah :

TABEL 3. 1

Tujuan - Sasaran - Indikator Sasaran dan Program
(Target Tahun 2026)

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Standar Oprasional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Persen	89,10
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabuoaten/Kota	Nilai SAKIP	Persen	68.75
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Persen	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Persen	100
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Persen	100
8	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

3.3.1. Tantangan

- 1) Tuntutan Reformasi di berbagai bidang dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
- 2) Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal.
- 3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 4) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

3.3.2. Peluang

- 1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan dan desa menunjukkan peningkatan yang baik, menjadi peluang meningkatkan kinerja pembangunan.
- 2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Jumantono untuk meningkatkan kinerja.
- 3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan. mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Jumantono mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujudnya tujuan dan sasaran Kecamatan Jumantono dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program, Kegiatan, dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jumantono.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai Urusan yang ditangani maka Kecamatan Jumantono masuk dalam unsur kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.

Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JUMANTONO

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jumantono

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Jumantono di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - b) Administrai Keuangan
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4). Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - 6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
 - 7). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada OPD
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Pengadaan Mebel
 - 2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan

- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - 1). Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a). Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - 1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a). Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - 1). Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - 2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional
 - 3). Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 3). Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pembangunan Desa
 - 4). Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jumantono, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumantono merupakan pencapaian kinerja pelayanan Jumantono. (lebih lengkap dilihat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Jumantono

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jumantono

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jumantono Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Jumantono
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Jumantono

Unit Organisasi : Kecamatan Jumantono

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
7		UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01	KECAMATAN												3.602.332.869		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2.026.901.816		3.139.500.000	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6.232.126		17.750.250
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Tersusunnya Renja,RKA, DPA dan Rentra SKPD	6.122.600	Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	95	2 dok		3.585.576	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6.122.600

7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Ralisasi Kinerja SKPD	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	11.627.650	Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	95	5 Laporan		2.646.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11.627.650 0
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.510.179.166				2.137.256.600	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.862.415.400	Gaji dan Tunjangan Pegawai	2.137.256.600	Kab. Karanganyar, Jumantono Semua Kelurahan	95	13 org/bulan		1.510.179.166	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95	2.137.256.600
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								88.719.904				316.049.900	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	jumlah paket Instansi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	13.992.050	Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100	12 paket		5.806.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum				13.992.050
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15.208.750	Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	0	0		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15.208.750
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistic kantor	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	95	12 paket		6.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.494.900
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	95	12 paket		4.646.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				14.587.750

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang –undangan yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	0	0			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4.828.850	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Karanganyar Jumantono, Semua Kelurahan	95	12 laporan			71.005.354	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				249.332.650	
7	01	01	2.06	10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kab. Karanganyar Jumantono, Semua Kelurahan	95	6 dokumen			962.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7.604.950	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0					111.032.500
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah paket mebel yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono Semua Kelurahan	0	0			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30.417.500	
7	01	01	2.07	00006	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah unit Peralatan Mesin dan lainnya yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	0	-			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80.615.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										376.036.220					473.248.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	0	-			0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.680.150	

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100	12 laporan		41.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				54.569.800
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 Laporan		334.636.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				416.998.050
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									45.734.400				84.162.750
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya		Kab. Karanganyar, Jumantono , Semua Kelurahan		5 unit		29.087.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				43.700.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		Kab. Karanganyar, Jumantono , Semua Kelurahan		25 unit		10.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31.728.500
7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara		Kab. Karanganyar Jumantono, Semua Kelurahan		-		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Karanganyar Jumantono, Semua Kelurahan		2 unit		6.337.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8.734.250
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									5.266.800				8.017.800

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						5.266.800					8.017.800			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan		12 laporan		5.266.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8.017.800	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						9.350.700					38.036.250			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						9.350.700					19.018.125			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah kegiatan musrenbang kel dan musrenbangcam		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 lembaga Kemasyarakatan		9.350.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	12.678.750	
7	01	003	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	6.339.375	
7	01	003	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													19.018.125	
7	01	003	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														19.018.125
7	01	003	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	19.018.125	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						9.939.550							203.568.400	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						9.939.550								203.568.400

7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan		9.939.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	203.568.400	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							86.749.500						121.682.161	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							86.749.500							121.682.161
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Keatuan Republik Indonesia	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	Jumlah orang yang mengikuti fasilitas, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	75 orang		50.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	69.986.700	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra suku, Umat Beragama, ras dan golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	120 orang		14.184.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	27.695.461	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen		21.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	24.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							24.064.400						91.528.258	

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							24.064.400					91.528.258
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 dokumen		2.872.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	4.500.000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata Pemerintahan desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 dokumen		4.017.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	25.509.645
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 dokumen		3.992.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	28.345.878
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 dokumen		1.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	3.500.000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	12 dokumen		1.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	3.500.000
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	0	0		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.676.060
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 dokumen		9.543.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17.496.675

	TOTAL	2.162.272.766		3.602.332.869
--	--------------	----------------------	--	----------------------

Tabel 4.2.
Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumantono Tahun 2026

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,10

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No.	Program Prioritas Kabupaten Karanganyar tahun 2026	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 5.266.800
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 86.749.500

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jumantono harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jumantono Tahun 2026

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Jumantono yang telah diusulkan dan ditetapkan

Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jumantono secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	